

Judul : Ada tiga PR besar Kementerian ATR/BPN AHY dinanti gebrakannya
Tanggal : Sabtu, 24 Februari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Ada Tiga PR Besar Kementerian ATR/BPN

AHY Dinanti Gebrakannya

Senayan menitipkan tiga pekerjaan besar kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tiga tugas besar tersebut, yakni menuntaskan target Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL), membenahi persoalan internal kementerian dan mafia tanah.

ANGGOTA Komisi II DPR Guspari Gaus mengatakan, ucapan selamat patut diberikan kepada AHY yang diberi amanah oleh Presiden mengisi jabatan Hadi Tjahjanto yang kebetulan direposisi menjadi Menteri Koordinator Polhukam.

"Nah, kita harapkan AHY bisa bekerja maksimal dalam sisa waktu sekitar 8 bulan lagi," kata dia kepada *Rakyat Merdeka*, Jumat (23/2/2024).

Guspari mengatakan, masih banyak pekerjaan terbengkalai yang harus dituntaskan. Yang paling utama adalah Program PTSL, yang ditargetkan harus tuntas sebanyak 120 juta hektare hingga akhir 2024.

"Tentu kita sebagai mitra dari Komisi II akan terus mendorong apa yang ditugaskan oleh Pak Jokowi mudah-mudahan pada masa akhir jabatannya, benar-benar selesai," ujarnya.

Guspari juga menaruh harapan besar, AHY bisa membereskan masalah birokrasi di internal Kementerian ATR/BPN. Sebab, banyak masalah duplikasi sertifikat tanah, sengketa tanah, dan sengkaretan masalah pertanahan

lainnya karena oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian ATR/BPN.

"Tentu ini sesuatu yang tidak gampang juga untuk bisa diselesaikan. Namun, kita berharap AHY bisa meminimalisir persoalan-persoalan itu," lanjut politisi senior PAN ini.

Dia sudah sering kali mengingatkan masalah duplikasi tanah yang merupakan biang kerok munculnya banyak sengketa tanah di masyarakat. Masalah ini muncul karena persoalan di internal kementerian diakibatkan kelalaian atau karena kebobolan atau memang akibat ketidakmampuan dalam mengelola sertifikat tanah di masyarakat.

"Tapi banyak masalah duplikasi tanah ini, oleh Kementerian ATR/BPN diserahkan ke pengadilan. Ini yang membuat Kementerian ATR/BPN malah membuat masalah, bukan menyelesaikan masalah. Akhirnya masyarakat ribut. Bisa ributnya antarwarga, dengan korporasi, bisa juga dengan BUMN," ujarnya.

Yang terakhir, Guspari nitip agar AHY juga fokus mengatasi masalah mafia tanah. Ditegas-

kannya, masalah mafia tanah itu merupakan sesuatu yang mudah untuk diberantas. Mafia tanah itu juga bukanlah sesuatu yang sunyi senyap.

Dijelaskannya, tindakan mafia tanah ini sangat kejam. Sebab dalam aksinya, mereka selalu berupaya mencaplok tanah bahkan merampok tanah rakyat dengan cara memanipulasi tanah. Disebut mafia karena aksinya berkelompok dan pintunya selalu melalui oknum ASN kementerian.

"Mafia tanah itu semuanya adalah oknum. Pertama ada pembeli, ada penjual bodong. Kemudian ada aktornya dan inisiatornya. Lalu ada juga cukong. Kemudian ada yang *mem-back up* dan ini oknum aparat penegak hukum. Kemudian ada namanya notaris, yang sebenarnya bisa diketahui semuanya," katanya.

Dia berkeyakinan besar, AHY bisa menuntaskan masalah-masalah di pertanahan ini. Apalagi AHY ini merupakan anak muda yang tentunya punya jiwa muda, inovasi, dan keberanian. Potensi-potensi ini yang akan muncul ketika dia memimpin kementerian yang diamanahkan oleh Presiden Jokowi.

"Saya tidak melihat jabatannya tetapi melihat latar belakangnya. Karena beliau ini anak muda. Tentu punya darah baru, energi baru, motivasi, dan keberanian. Nilai-nilai inilah yang kita harap-

kan muncul dari AHY sehingga memiliki keberanian untuk menuntaskan tiga hal tersebut," tambahnya.

Politisi asal Sumatera Barat ini mengatakan, dengan sisa masa kerja yang tinggal 8 bulan, AHY cukup melanjutkan program dari menteri yang lama. AHY juga tidak perlu membuat perencanaan terhadap kegiatan dan program baru mengingat Komisi II bersama Kementerian ATR/BPN di era Hadi Tjahjanto sudah mengesahkan program dan kegiatan di tahun 2024.

"Cuma yang jadi persoalan, bagaimana menuntaskan PTSL yang sudah dipatok jumlahnya

sekitar tadi. Kemudian masalah tentang sengkaretan tanah, dan terakhir mafia tanah. Paling tidak, beliau bisa meminimalisir dan membuat orang tidak berani melakukan hal-hal yang merampok tanah rakyat," pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi melantik Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/Kepala BPN di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

AHY menggantikan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang kini menempati jabatan Menko Polhukam, menggantikan Maftud MD. ■ KAL